



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOŁOK**

**RENCANA KERJA  
( RENJA )**

**BADAN KEUANGAN DAERAH**

**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Keuangan Daerah yang memberikan gambaran dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami telah berupaya secara maksimum, namun tentu masih terdapat kekurangannya. Untuk itu sangat diharapkan saran dalam penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Terakhir kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian renja ini, semoga dapat bermanfaat adanya, terima kasih.

Arosuka, Januari 2022

**PLt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**INDRA GUSNADY.SE.MSi**  
**NIP. 19700804 199803 1 006**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam jangka 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Daerah Tahun 2006-2025 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun RPJM Daerah. Operasional RPJM dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana strategis dan rencana kerja.

Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan OPD secara rinci.

Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan OPD.

Rencana Kerja disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Dalam menyusun Rencana Kerja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Bupati Solok Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

#### **MAKSUD**

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi seluruh aparatur pengelola keuangan yang ada di Badan Keuangan Daerah agar dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang sama dalam menyusun rencana dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Solok. Dalam hubungan tersebut diharapkan setiap aparatur pengelola keuangan harus mau dan mampu mengembangkan tenaga dan pikirannya dalam menentukan output (hasil) dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

#### **TUJUAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan Daerah .

## **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN.**

### **BAB I PENDAHULUAN.**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP.**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN**

##### **RENSTRA OPD**

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah sampai Tahun 2021 yang sesuai dengan Dokumen Anggaran Perubahan Tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 196.086.018.616,20 dengan realisasi sebesar Rp. 188.240.066.389,80 atau 96,00% yang digunakan untuk membiayai 4 program, 14 kegiatan dan 63 sub kegiatan.

Untuk melihat capaian target kinerja yang direncanakan berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 berikut ini akan diuraikan target dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 terlampir.

**TABEL. 2.1.**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2021**

**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			
2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah									
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang disediakan	Renja dan Renstra	100	100	100	100	100	300	100
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan RKA yang disediakan	RKA	100	100	100	100	100	300	100
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perubahan RKA	Perubahan RKA	100	100	100	100	100	300	100
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disediakan	DPA	100	100	100	100	100	300	100
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA yang disediakan	DPPA	100	100	100	100	100	300	100
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah LKJiP, LPPD, LKPJ, Laporan individu triwulan yang disediakan	LKJiP, LPPD, LKPJ, Laporan individu triwulan	100	100	100	100	100	300	100
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan fisik dan keuangan, Laporan evaluasi triwulan yang disediakan	Laporan fisik dan keuangan, Laporan evaluasi triwulan	100	100	100	100	100	300	100
2	<b>Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah</b>									
8	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji & tunjangan, TPP dan Insentif pajak dan retribusi daerah yang disediakan	Gaji & tunjangan, TPP dan Insentif pajak dan retribusi daerah	100	100	100	100	100	300	100
9	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Jurnal, Buku besar, Laporan fungsional yang disediakan	Jurnal, Buku besar, Laporan fungsional	100	100	100	100	100	300	100
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah LRA, Laporan perubahan SAL, Neraca, LO, LPE dan CALK yang disediakan	LRA, Laporan perubahan SAL, Neraca, LO, LPE dan CALK.	100	100	100	100	100	300	100

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	
11	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semester yang disediakan		Laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	100	100	100	100	100
12	Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran		Jumlah Laporan semester yang disediakan		Laporan semester	100	100	100	100	100
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundangan.		Jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK yang diadakan		Bimtek ASN	100	100	100	100	100
4	<b>Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah</b>									
14	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah alatt-alat listrik dan penerangan yang disediakan		Alat-alat listrik	100	100	100	100	100
15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana		sarana dan prasarana kantor	100	100	100	100	100
16	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Penyediaan Alat Rumah Tangga		Peralatan rumah tangga	100	100	100	100	100
17	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor Kantor yang disediakan.		Alat tulis kantor	100	100	100	100	100
18	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Jumlah Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan.		Barang cetakan dan pengadaan	100	100	100	100	100
19	Fasilitas kunjungan tamu		Jumlah persediaan makanan dan minuman tamu yang disediakan.		Makan dan minum tamu	100	100	100	100	100
20	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan.		Rapat koordinasi dan konsultasi	100	100	100	100	100
5	<b>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>									
21	Pengadaan mebel		Jumlah Pengadaan Mebeleur yang disediakan.		Pengadaan mebeleur	100	100	100	100	100
6	<b>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>									
22	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Materai 10000 yang disediakan.		Materai 10000	100	100	100	100	100
23	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah tagihan air dan listrik yang dibayarkan		Tagihan air dan listrik	100	100	100	100	100

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Terget Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2019			Target Progan dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	
24	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyedia Jasa Kebersihan	Jasa kebersihan	100	100	100	100	300	100	
7	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
25	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pajak kendaraan roda empat dan roda dua serta pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua yang disediakan.	Pajak kendaraan roda empat dan roda dua serta pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua	100	100	100	100	300	100	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang disediakan.	Pemeliharaan gedung kantor	100	100	100	100	300	100	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan.	Peralatan gedung kantor	100	100	100	100	300	100	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
8	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah									
28	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang disediakan.	KUA dan PPAS	100	100	100	100	300	100	
29	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang disediakan.	KUA dan PPAS	100	100	100	100	300	100	
30	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA dan DPPA SKPD yang disediakan.	DPA dan DPPA SKPD	100	100	100	100	300	100	
31	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah APBD Penjabaran dan APBD yang disediakan.	APBD Penjabaran dan APBD	100	100	100	100	300	100	
32	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Perubahan APBD Penjabaran dan Perubahan APBD yang disediakan.	Perubahan APBD Penjabaran dan Perubahan APBD	100	100	100	100	300	100	
33	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Pokok-pokok pengelolaan KD, pedoman penyusunan RKS SKPD dan standar biaya yang disediakan.	Pokok-pokok pengelolaan KD, pedoman penyusunan RKS SKPD dan standar biaya	100	100	100	100	300	100	
9	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah			100	100	100	100	300	100	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(5+6)	9	10=(5+6+7+9)	11	
34	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Pembinaan tentang peraturan pengelolaan KD yang disediakan.	Pembinaan tentang peraturan pengelolaan KD.	100	100	100	100	100	300	100
35	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah SP2D SKPD yang disediakan.	SP2D SKPD	100	100	100	100	100	300	100
36	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan usahaan dan	Jumlah Regulasi SISDUR Pengelolaan KD yang disediakan.	Regulasi SISDUR Pengelolaan KD	100	100	100	100	100	300	100
37	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten / kota	Jumlah Pembinaan SKPD dalam pengelolaan gaji dan tunjangan yang disediakan.	Pembinaan SKPD dalam pengelolaan gaji dan tunjangan.	100	100	100	100	100	300	100
10	Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah									
38	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan yang disediakan.	Laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan.	100	100	100	100	100	300	100
39	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban	Jumlah Rekonsiliasi dan verifikasi aset secara berkala yang disediakan.	Rekonsiliasi dan verifikasi aset secara berkala.	100	100	100	100	100	300	100
40	Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	Jumlah Laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester yang disediakan.	Laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester .	100	100	100	100	100	300	100
41	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang disediakan.	Laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	300	100
42	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Perda dan Perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disediakan.	Perda dan Perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	100	100	100	100	100	300	100
43	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Tanggapan terhadap hasil temuan BPK yang disediakan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Tanggapan terhadap hasil temuan BPK Tindak lanjut hasil pemeriksaan.	100	100	100	100	100	300	100

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	
44	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perpendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Surat keterangan tanggungjawab mutlak yang disediakan.	Surat keterangan tanggungjawab mutlak	100	100	100	100	300	100	
11	Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah					#DIV/0!			100	
45	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah ADN dan DD yang disediakan.	ADN dan DD	100	100	100	100	300	100	
46	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Penanganan bencana alam yang disediakan.	Penanganan bencana alam	100	100	100	100	300	100	
47	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	Jumlah Penyaluran dana bagi hasil yang disediakan.	Penyaluran dana bagi hasil.	100	100	100	100	300	100	
12	Kegiatan Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah									
48	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah Aplikasi APBD, DPA dan DPPA yang disediakan.	Aplikasi APBD, DPA dan DPPA	100	100	100	100	300	100	
49	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Pemahaman SKPD dalam program SIPD yang disediakan.	Pemahaman SKPD dalam program SIPD.	100	100	100	100	300	100	
<b>III PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>										
13	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah									
50	Penyusunan standar harga	Jumlah Standar satuan harga yang disediakan.	Standar satuan harga.	100	100	100	100	300	100	
51	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah SK penetapan DKBMD dan DKPBMD yang disediakan.		100	100	100	100	300	100	
52	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Pengelolaan BMD SKPD yang disediakan.	Pengelolaan BMD SKPD.	100	100	100	100	300	100	
53	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan dinas dan gedung kantor yang diasuransikan yang disediakan.	Kendaraan dinas dan gedung kantor yang diasuransikan.	100	100	100	100	300	100	
54	Penilaian barang milik daerah	Jumlah Penilaian BMD yang disediakan.	Penilaian BMD	100	100	100	100	300	100	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Terget Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
55	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Koordinasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang disediakan.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	300	100
56	Optimalisasi penggunaan , pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Optimalisasi pengelolaan BMD yang disediakan.	Optimalisasi pengelolaan BMD.	100	100	100	100	100	300	100
57	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan semester dan tahunan BMD yang disediakan.	Laporan semester dan tahunan BMD	100	100	100	100	100	300	100
58	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan semester dan tahunan BMD yang disediakan.	Laporan semester dan tahunan BMD	100	100	100	100	100	300	100
<b>IV PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>							#DIV/0!			
14	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah						#DIV/0!			
59	Analisa dan pengembangan pajak daerah,serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan PAD	100	100	100	100	100	300	100
60	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan PAD	100	100	100	100	100	300	100
61	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan PAD	100	100	100	100	100	300	100
62	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan PAD	100	100	100	100	100	300	100
63	Penagihan pajak daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan PAD	100	100	100	100	100	300	100

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.**

1. Jumlah OPD yang menyampaikan RKA dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu.
2. Jumlah aparatur yang mampu menyusun data barang milik daerah dengan baik dan benar.
3. Jumlah OPD yang dapat menyediakan data barang milik daerah dengan baik dan benar sehingga dapat ditelusuri.
4. Adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
5. Terpertahankannya Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

- 1. Tingkat Kinerja pelayanan OPD yang terkait dengan pelayanan OPD yaitu:**
  - a. Koordinasi dan konsultasi OPD dalam pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah harus dilaksanakan secara baik sehingga dapat menyusun laporan keuangan dan laporan BMD tepat waktu.
  - b. Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih diperlukan tenaga yang profesional di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk menyusun laporan/neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada sisi pendapatan daerah memerlukan sumber daya manusia yang profesional di bidang penatausahaan, teknologi informasi dan sarana prasarana aplikasi.

1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya.
2. Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan pendapatan asli daerah yang memanfaatkan teknologi informasi.
3. Potensi pendapatan daerah yang belum tergarap diperlukan kecepatan dalam pelaksanaannya baik secara regulasi maupun teknis lapangan.

**2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD adalah :**

- a. Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review seiring dengan perkembangan kelembagaan serta perubahan peraturan perundang-undangan. Selain itu belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah, dan standar operasional prosedur mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja.

- b. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak, retribusi daerah dengan benar.
- d. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah.

**3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD adalah :**

**a. Tantangan :**

- 1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi oleh belum konsistennya perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana kerja yang ada dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar baru terlaksana di akhir tahun anggaran.
- 2. Dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) perangkat daerah belum menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.
- 3. Belum optimalnya penerapan manajemen aset pada perangkat daerah.
- 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah.

5. Kurang optimalnya sistem pengawasan pengelolaan pendapatan dari sektor pajak daerah.
6. Kurangnya sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.

**b. Peluang :**

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Solok.
  2. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.
  3. Perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  4. Ketersediaan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
  5. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
- 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklajuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu :**
- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
  - b. Belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD :**

1. Setelah dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD pada tahun 2022 untuk bidang perencanaan anggaran dan bidang perpendaharaan keuangan daerah perlu dianggarkan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah dan SIPD bagi kepala OPD dan kasubag perencanaan, serta bimtek SIPD penatausahaan dan pelaporan bagi bendahara, PPK dan KPA OPD.
2. Untuk bidang pengelolaan barang milik daerah perlu dianggarkan sosialisasi Permendagri No.47 tahun 2021 dan penerapan E-BMD serta penyediaan sarana dan prasarana untuk data base asset (server).
3. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia petugas lapangan yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta sosialisasi terhadap wajib pajak dalam menumbuh kembangkan kesadaran dan memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak.

### **BAB III**

### **TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.**

Standar Operasional Prosedur Badan Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **I. Sekretariat.**

1. SOP Surat Masuk.
2. SOP Surat Keluar.
3. SOP Kenaikan Gaji Berkala.
4. SOP Penyusunan DUK dan Bezzeting.
5. SOP Pengurusan Karis dan Karsu.
6. SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat.
7. SOP Pelaksanaan Rapat Staf.
8. SOP Pengajuan Cuti.
9. SOP Pengajuan Pensiun.
10. SOP Pengisian SKP.
11. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
12. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
13. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
14. SOP Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
15. SOP Rencana Anggaran Kas (RAK).
16. SOP Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
17. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
18. SOP Penyusunan LPPD dan LKPJ.
19. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja.
20. SOP Survei Kepuasan Masyarakat.
21. SOP Pencairan Gaji.
22. SOP Pencairan TPP.
23. SOP Pencairan Uang Pesediaan (UP).
24. SOP Pengajuan SPP-GU.
25. SOP Pengajuan SPP-TU.
26. SOP Verifikasi SPP.
27. SOP Penyusunan Laporan Keuangan.

## **II. Bidang Penyusunan Anggaran Daerah.**

28. SOP Penyusunan DPA – DPPA SKPD.
29. SOP Penyusunan DPA – DPPA SKPD.
30. SOP Verifikasi DPA dan Pergeseran.
31. SOP Verifikasi RKAP-SKPD dan/Atau Perubahan DPA SKPD
32. SOP Sistem Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
33. SOP Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya.
34. SOP Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA – SKPD..
35. SOP Penyusunan APBD

## **III. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.**

36. SOP Pendistribusian SPPT, DHKP, TTS dan DPH PBB P2.
37. SOP Penagihan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
38. SOP Permintaan Usulan Target PAD.
39. SOP Pembuatan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
40. SOP Pembentukan Tim Pendataan Objek Pajak.
41. SOP Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah.
42. SOP Pembuatan Data Target PAD

## **IV. Bidang Perpendaharaan Keuangan Daerah.**

43. SOP Penerbitan Daftar Gaji Pegawai
44. SOP Penerbitan SKPP.
45. SOP Penerbitan SP2D.

## **V. Bidang Barang Milik Daerah.**

46. SOP Penerbitan Kartu Inventaris Barang.
47. SOP Penerbitan Kartu Inventaris Barang.
48. SOP Penerbitan Kartu Inventaris Barang.
49. SOP Pemberitahuan Nilai Sewa Barang Milik Daerah.
50. SOP Persetujuan Bupati Nilai Sewa Barang Milik Daerah.
51. SOP Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah.
52. SOP Penghapusan BMD Melalui pemusnahan.

## **VI. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

54. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan.
55. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran.
56. SOP Penyusunan Laporan Keuangan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kinerja keuangan daerah yang responsif.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas.

Sasaran merupakan penjabaran dan implementasi dari tujuan SKPD yang ingin dicapai dan di hasilkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya anggaran berbasis usulan masyarakat.
2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>31,850,527,709</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>248,510,200</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92,456,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	156,054,200
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>30,733,408,625</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30,590,588,425
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142,820,200
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>185,442,000</b>
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	185,442,000

<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>358,257,975</b>
<b>6</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>5,010,000</b>
<b>7</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>55,283,475</b>
<b>8</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>11,436,000</b>
<b>9</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>76,271,500</b>
<b>10</b>	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>27,901,000</b>
<b>11</b>	<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	<b>33,000,000</b>
<b>12</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>149,356,000</b>
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>60,466,509</b>
<b>13</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>3,600,000</b>
<b>14</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik</b>	<b>56,866,509</b>
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>264,442,400</b>
<b>15</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>230,392,400</b>
<b>16</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>34,050,000</b>
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>152,698,426,179</b>
<b>7</b>	<b>Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1,585,575,450</b>
<b>17</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</b>	<b>238,979,700</b>
<b>18</b>	<b>Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</b>	<b>235,872,250</b>
<b>19</b>	<b>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</b>	<b>116,901,500</b>
<b>20</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</b>	<b>324,379,750</b>
<b>21</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</b>	<b>261,494,250</b>
<b>22</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran</b>	<b>407,948,000</b>
<b>8</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1,258,620,995</b>
<b>23</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>	<b>362,371,895</b>

24	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	403,899,700
25	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	98,312,500
26	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	394,036,900
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	993,690,050
27	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	85,219,300
28	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan -LO dan Beban	68,974,200
29	.Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	136,306,900
30	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	241,190,850
31	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	269,313,300
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Kerugian Daerah	192,685,500
10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	148,299,996,209
33	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	138,804,124,000
34	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5,775,000,000
35	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Solok	3,720,872,209
11	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	560,543,475
36	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	424,136,250

<b>37</b>	<b>Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>136,407,225</b>
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>755,196,150</b>
<b>12</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>755,196,150</b>
<b>38</b>	<b>Penyusunan Standar Harga</b>	<b>43,522,000</b>
<b>39</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>25,005,000</b>
<b>40</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>	<b>158,979,600</b>
<b>41</b>	<b>Pengamanan Barang Milik Daerah</b>	<b>175,177,950</b>
<b>42</b>	<b>Penilaian Barang Milik Daerah</b>	<b>32,720,000</b>
<b>43</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>30,563,250</b>
<b>44</b>	<b>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempat, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah</b>	<b>81,935,350</b>
<b>45</b>	<b>Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>53,486,750</b>
<b>46</b>	<b>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>153,806,250</b>
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>910,940,650</b>
<b>13</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>910,940,650</b>
<b>47</b>	<b>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</b>	<b>359,158,350</b>
<b>48</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</b>	<b>54,166,500</b>
<b>49</b>	<b>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</b>	<b>169,376,675</b>
<b>50</b>	<b>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</b>	<b>122,946,500</b>
<b>51</b>	<b>Penagihan Pajak Daerah</b>	<b>205,292,625</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>186,215,090,688</b>

**TABEL. 3. 1**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEUANGAN				189,459,502,510.00	KEUANGAN				186,215,090,688.00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25,081,961,441.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31,850,527,709.00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah				355,447,300.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				248,510,200.00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	2,173,600.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	92,456,000.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	353,273,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	156,054,200.00	
II	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah				23,721,897,307.00	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah				30,733,408,625.00	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang/bulan	23,721,897,307.00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang/bulan	30,590,588,425.00	
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dok	-	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dok	142,820,200.00	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				204,988,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				185,442,000.00	
1	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	BKD	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dok	204,988,000.00	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	BKD	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dok	185,442,000.00	
IV	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah				292,209,754.00	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah				358,257,975.00	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	5,511,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	5,010,000.00	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKD	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	88,761,174.00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKD	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	55,283,475.00	
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKD	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	4 paket	12,579,600.00	Penyediaan peralatan rumah tangga	BKD	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	4 paket	11,436,000.00	
4	Penyediaan bahan logistik kantor	BKD	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	12 paket	83,898,650.00	Penyediaan bahan logistik kantor	BKD	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	12 paket	76,271,500.00	
5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	BKD	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 paket	33,760,100.00	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	BKD	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 paket	27,901,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
6	Fasilitas kunjungan tamu	BKD	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 lap	67,320,000.00	Fasilitas kunjungan tamu	BKD	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 lap	33,000,000.00	
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	379,230.00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	149,356,000.00	
V	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				62,470,080.00	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				60,466,509.00	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BKD	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	360 lap	3,600,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	BKD	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	360 lap	3,600,000.00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 lap tagihan	58,870,080.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 lap tagihan	56,866,509.00	
VI	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				444,949,000.00	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				264,442,400.00	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	7 unit kend roda empat dan 16 unit kend roda	399,860,000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	7 unit kend roda empat dan 16 unit kend roda	230,392,400.00	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BKD	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	45,089,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	BKD	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	34,050,000.00	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				162,147,694,469.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				152,698,426,179.00	
VII	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah				2,306,408,164.00	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah				1,585,575,450.00	
1	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	BKD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun.	2 dok	333,554,713.00	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	BKD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun.	2 dok	238,979,700.00	
2	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	BKD	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun.	2 dok	315,289,825.00	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	BKD	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun.	2 dok	235,872,250.00	
3	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	BKD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	2 dok	129,802,363.00	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	BKD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	2 dok	116,901,500.00	
4	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	BKD	Jumlah perda ttg APBD dan peraturan kepala daerah ttg penjabaran APBD	2 dok	515,962,300.00	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	BKD	Jumlah perda ttg APBD dan peraturan kepala daerah ttg penjabaran APBD	2 dok	324,379,750.00	
5	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	BKD	Jumlah perda ttg perubahan APBD dan peraturan kepala daerah ttg penjabaran perubahan APBD	2 dok	580,892,600.00	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	BKD	Jumlah perda ttg perubahan APBD dan peraturan kepala daerah ttg penjabaran perubahan APBD	2 dok	261,494,250.00	
6	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	BKD	Jumlah dokuem regulasi serta kebijakan bidang anggaran.	3 dok	430,906,363.00	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	BKD	Jumlah dokuem regulasi serta kebijakan bidang anggaran.	3 dok	407,948,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
VIII	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah				1,283,104,814.00	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah				1,258,620,995.00	
1	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengolahan kas daerah	40 dok	462,577,425.00	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengolahan kas daerah	40 dok	362,371,895.00	
2	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	BKD	Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	40 dok	430,992,763.00	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	BKD	Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	40 dok	403,899,700.00	
3	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan	BKD	Jumlah petunjuk teknis adm keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	1 dok	-	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan	BKD	Jumlah petunjuk teknis adm keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	1 dok	98,312,500.00	
4	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten / kota	BKD	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	40 orang	389,534,626.00	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten / kota	BKD	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	40 orang	394,036,900.00	
IX	Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah				2,007,952,125.00	Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah				993,690,050.00	
1	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	BKD	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 laporan	670,975,450.00	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	BKD	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 laporan	85,219,300.00	
2	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban	BKD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	12 dok	221,946,650.00	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	BKD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	12 dok	68,974,200.00	
3	Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	BKD	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	17 laporan	128,068,000.00	Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	BKD	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	17 laporan	136,306,900.00	
4	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	BKD	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	1 laporan	291,430,850.00	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	BKD	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	1 laporan	241,390,850.00	
5	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan ranperda ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	BKD	Laporan ranperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan ranperda ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	2 dok	323,329,900.00	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepada daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	BKD	Laporan ranperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan ranperda ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 dok	269,313,300.00	
6	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 dok	372,201,275.00	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 dok	192,685,500.00	
X	Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah				155,747,730,653.00	Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah				148,299,996,209.00	
1	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	BKD	Jumlah laopran hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	74 laporan	150,028,798,300.00	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	BKD	Jumlah laopran hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	74 laporan	138,804,124,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
2	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	BKD	Jumlah laopran hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 dok	2,500,000,000.00	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	BKD	Jumlah laopran hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 dok	5,775,000,000.00	
3	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	BKD	Jumlah laopran hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	74 laporan	3,218,932,353.00	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	BKD	Jumlah laopran hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	74 laporan	3,720,872,209.00	
XI	Kegiatan Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah				802,498,713.00	Kegiatan Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah				\$60,543,475.00	
1	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan SIPD bidang keuangan daerah	5 dok	171,614,938.00	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan SIPD bidang keuangan daerah	5 dok	424,136,250.00	
2	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	BKD	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	40 orang	630,883,775.00	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	BKD	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	40 orang	136,407,225.00	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,318,905,950.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				755,196,150.00	
XII	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah				1,318,905,950.00	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah				755,196,150.00	
1	Penyusunan standar harga	BKD	Jumlah standar harga yang disusun	1 dok	87,584,500.00	Penyusunan standar harga	BKD	Jumlah standar harga yang disusun	1 dok	43,522,000.00	
2	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	BKD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	40 dok	33,946,000.00	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	BKD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	40 dok	25,005,000.00	
3	Penatausahaan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 lap	219,612,000.00	Penatausahaan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 lap	158,979,600.00	
4	Pengamanan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	24 lap	638,467,000.00	Pengamanan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	24 lap	175,177,950.00	
5	Penilaian barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	20 lap	47,465,200.00	Penilaian barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	20 lap	32,720,000.00	
6	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	1 lap	50,003,500.00	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	1 lap	30,563,250.00	
7	Optimalisasi penggunaan , pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	4 dok	87,325,000.00	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	4 dok	81,935,350.00	
8	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	2 lap	62,800,250.00	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	2 lap	53,486,750.00	
9	Penyusunan laporan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2 lap	91,702,500.00	Penyusunan laporan barang milik daerah	BKD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	2 lap	153,806,250.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
D	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>910,940,650.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>910,940,650.00</b>	
XIII	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah				<b>1,900,605,796.00</b>	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah				<b>910,940,650.00</b>	
1	Analisa dan pengembangan pajak daerah,serta penyusunan kebijakan pajak daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	2 dok	<b>768,978,708.00</b>	Analisa dan pengembangan pajak daerah,serta penyusunan kebijakan pajak daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	2 dok	<b>359,158,350.00</b>	
2	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	BKD	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	10 unit	<b>468,197,263.00</b>	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	BKD	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	10 unit	<b>54,166,500.00</b>	
3	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	BKD	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	5 lap	<b>305,939,575.00</b>	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	BKD	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	5 lap	<b>169,376,675.00</b>	
4	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	BKD	Jumlah data laporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 dok	<b>184,031,025.00</b>	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	BKD	Jumlah data laporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 dok	<b>122,946,500.00</b>	
5	Penagihan pajak daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1823 dok	<b>173,459,225.00</b>	Penagihan pajak daerah	BKD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1823 dok	<b>205,292,625.00</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Solok serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi di harapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintahan Dearah Kabupaten Solok.

Arosuka, Januari 2022

**M PLt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**INDRA GUSNADY.SE.MSi**  
**NIP. 19700804 199803 1 006**